

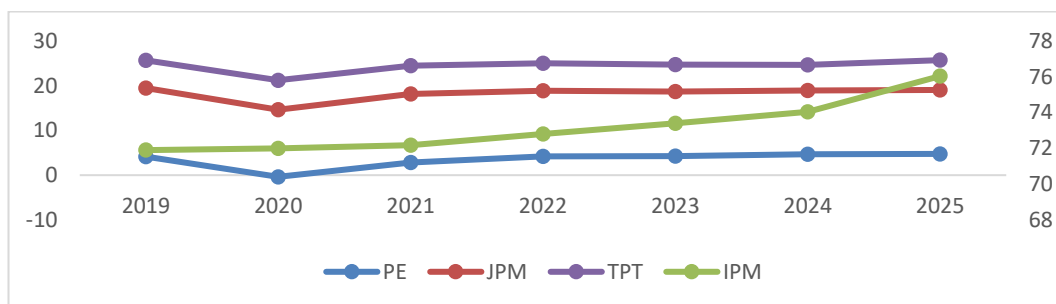
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting seberapa baik suatu daerah berkembang. Pertumbuhan berkelanjutan tidak hanya berarti peningkatan *output* produksi, tetapi juga kesejahteraan sosial yang lebih baik, pengurangan kemiskinan, dan kualitas pekerja yang lebih baik (Todaro & Smith, 2020). Di Indonesia, capaian pertumbuhan ekonomi antar provinsi masih menunjukkan ketimpangan. Provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur mendominasi kontribusi ekonomi nasional, sedangkan provinsi lain seperti Aceh mengalami dinamika pertumbuhan yang lebih fluktuatif (BPS, 2024). Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, tetapi juga oleh seberapa besar kontribusi masing-masing provinsi terhadap perekonomian.

Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji karena memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Meskipun pertumbuhan ekonomi Aceh meningkat dari 4,23 persen pada 2023 menjadi 4,66 persen pada 2024, tingkat kemiskinan tetap tinggi sekitar 12–13 persen sehingga masuk dalam kategori provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Sumatra (BPS Aceh, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan *output* ekonomi belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara merata.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Aceh 2019-2025 (persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025)

Selain itu struktur ekonomi Aceh yang masih bergantung pada sektor primer dan fluktuasi sektor migas menyebabkan pertumbuhan ekonomi rentan terhadap perubahan harga komoditas (Bappenas, 2023). Ketika kinerja migas melemah, PDRB Aceh ikut menurun sehingga dampaknya langsung terasa pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Beberapa variabel dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia, dan pengangguran.

Jika jumlah penduduk miskin meningkat, tetapi kualitas sumber daya manusia tidak membaik, maka permintaan terhadap sumber daya, infrastruktur, dan kapasitas layanan publik akan meningkat. Tekanan ini selanjutnya dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan membuat proses pembangunan berjalan lebih lambat. Jumlah penduduk miskin yang tinggi memicu ketimpangan distribusi kesempatan ekonomi, sehingga menghambat daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal (Bappenas, 2020).

Peningkatan jumlah penduduk miskin tidak hanya berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pembangunan manusia. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbatas akan

memengaruhi capaian indikator pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

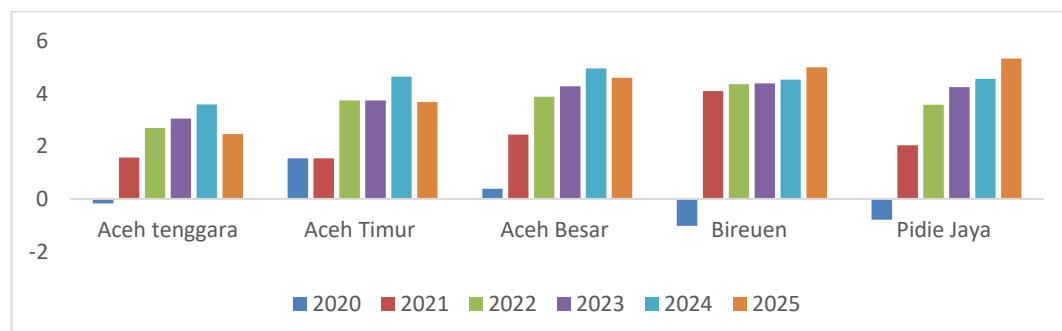
Selain indeks pembangunan manusia dan jumlah orang miskin, pengangguran juga diyakini memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyak masalah sosial dan ekonomi dapat muncul sebagai akibat dari pengangguran. Dalam dunia ideal, penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan jumlah orang yang bekerja akan menyebabkan upah yang lebih tinggi dan kemiskinan yang lebih rendah. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh fenomena "pertumbuhan tanpa lapangan kerja", peningkatan produksi ekonomi tidak selalu berarti lebih banyak lapangan kerja, terutama di daerah-daerah di mana industri padat modal merupakan pendorong utama ekspansi (Basri & Patunru, 2021).

Fenomena yang terjadi di Provinsi Aceh tampak jelas pada beberapa kabupaten/kota, di mana pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir menunjukkan pola yang tidak stabil. Namun demikian, terdapat lima kabupaten yaitu Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Besar, Bireuen, dan Pidie Jaya yang menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi lebih positif dibandingkan kabupaten lainnya, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut.

Kelima kabupaten tersebut secara spasial berada pada satu koridor wilayah timur Aceh yang memiliki keterhubungan aksesibilitas dan aktivitas ekonomi yang relatif serupa, yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Pidie Jaya. Wilayah ini terhubung oleh jalur logistik darat utama yang memudahkan arus barang, jasa, dan tenaga kerja antarkabupaten. Selain kedekatan geografis, kelima wilayah

tersebut juga memiliki kesamaan karakteristik struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor primer yang berkembang ke arah aktivitas pengolahan dan perdagangan hasil komoditas. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi pada wilayah ini tidak hanya bersumber dari produksi bahan mentah, tetapi juga dari aktivitas industri pengolahan berbasis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan (agro-based industry). Kesamaan karakteristik spasial dan struktur ekonomi tersebut menjadikan kelima kabupaten ini layak dipandang sebagai satu kluster wilayah timur Aceh yang memiliki pola dinamika pertumbuhan ekonomi yang serupa dan relevan untuk dianalisis dalam satu kerangka penelitian.

Pemilihan kelima kabupaten ini juga didasarkan pada pertimbangan metodologis, yaitu adanya variasi indikator kemiskinan, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka yang memadai antarkabupaten sehingga memenuhi syarat analisis data panel. Adapun grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi pada 5 kabupaten yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Ekonomi pada 5 Kabupaten Tahun 2019-2025 (Persen)
Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025)

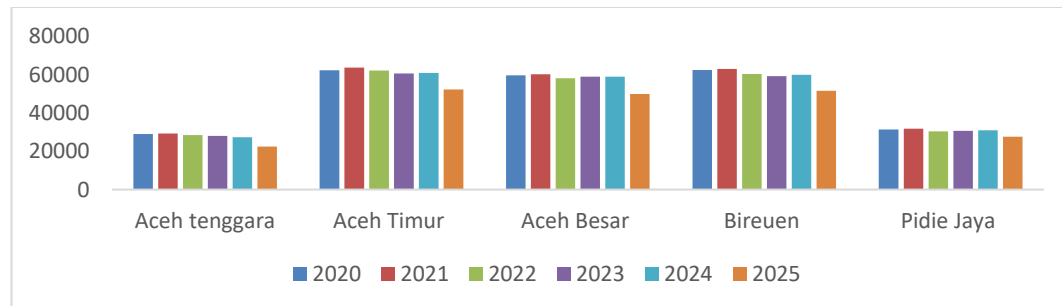
Tren meningkatnya pertumbuhan ini menjadi fenomena ekonomi yang menarik untuk diteliti, sehingga penting untuk dianalisis faktor apa yang diduga mendorong perbaikan tersebut. Adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak

berarti menghilangkan masalah, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, kelima kabupaten tersebut tetap memiliki tantangan besar pada indikator social ekonominya sehingga menimbulkan kesenjangan antara capaian pertumbuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi “*growth without development*”, sehingga penting untuk dianalisis apakah variabel sosial ekonomi seperti kemiskinan, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka berperan dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, persentase penduduk miskin Aceh pada tahun 2024 masih berada pada kisaran 12–13 persen seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1, keadaan tersebut menjadikannya salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi ini kontras dengan pertumbuhan ekonomi Aceh yang pada tahun 2023 tercatat sebesar 4,23 persen dan meningkat menjadi 4,66 persen pada tahun 2024 (BPS Aceh, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2019–2025, kondisi jumlah penduduk miskin pada lima kabupaten yang menjadi fokus penelitian menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antarwilayah. Kabupaten Aceh Timur merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yang mencerminkan masih kuatnya permasalahan kemiskinan struktural meskipun daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif positif. Selain kabupaten Aceh timur, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Pidie Jaya juga memiliki kemiskinan yang tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun kelima distrik tersebut mengalami tren

peningkatan pembangunan ekonomi, penurunan jumlah penduduk miskin belum terjadi secara merata di lima Kabupaten.

Adapun grafik perkembangan jumlah penduduk miskin pada 5 kabupaten yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin pada 5 Kabupaten Tahun 2019-2025
Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025)

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa meskipun ekonomi Aceh mengalami pertumbuhan, namun peningkatan tersebut belum cukup kuat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Jumlah penduduk miskin yang tinggi dapat menciptakan tekanan tambahan terhadap anggaran pemerintah, karena meningkatnya kebutuhan bantuan sosial dan pelayanan dasar.

Layanan publik, infrastruktur, dan sumber daya akan terbebani jika kualitas sumber daya manusia tidak meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk miskin. Tekanan ini selanjutnya dapat menurunkan produktivitas masyarakat dan membuat proses pembangunan berjalan lebih lambat. Jumlah penduduk miskin yang tinggi memicu ketimpangan distribusi kesempatan ekonomi, sehingga menghambat daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal (Bappenas, 2020).

Hasil temuan Saragih (2019) Studi menunjukkan bahwa meningkatnya kemiskinan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi daerah. Padang

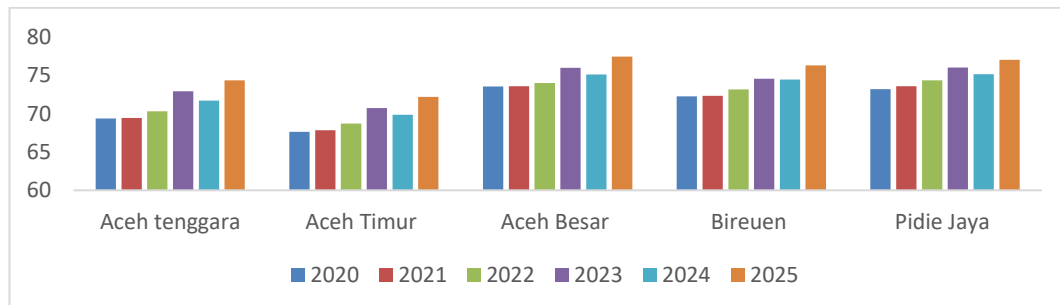
dan Murtala (2019) menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh besar dan buruk terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Monalisa dkk. (2025) menunjukkan bahwa kemiskinan secara substansial memengaruhi pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh.

Kemiskinan yang terus meningkat tidak hanya buruk bagi perekonomian, tetapi juga sangat terkait dengan kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi yang terbatas akan mempersulit pencapaian tujuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang baik. Menurut BPS Aceh (2023), nilai IPM Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif namun belum signifikan.

IPM di Provinsi Aceh mengalami fluktuasi lima tahun terakhir yang dipengaruhi oleh Covid-19, dan peningkatan pada indikator rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, serta pengeluaran per kapita. Fenomena keterkaitan data dengan teori pembangunan ekonomi salah satunya terjadi pada tahun 2020 tercermin pada gambar 1.1. Ketika IPM di Provinsi Aceh mengalami peningkatan dari 71,9 pada 2019 menjadi 71,99 pada 2020, sementara pertumbuhan ekonomi turun menjadi negatif -0,37 persen.

Selain itu disparitas IPM antar wilayah di Aceh masih tinggi, di mana beberapa kabupaten/kota masih tergolong rendah. Ketimpangan ini mencerminkan belum meratanya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Jika tidak segera ditangani, hal ini berisiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah, karena kualitas SDM di beberapa wilayah belum mampu mendukung

sektor produktif secara optimal (Bappenas, 2022). Adapun grafik perkembangan indeks pembangunan manusia pada 5 kabupaten yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia pada 5 Kabupaten Tahun 2019-2025 (Persen)

Pada tahun 2023, Kabupaten Pidie Jaya memiliki HDI tertinggi yaitu 76,04. Hal ini karena HDI tersebut terus meningkat secara stabil dari tahun-tahun sebelumnya, yang berarti kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat semuanya membaik. Pada tahun 2020, Kabupaten Aceh Timur memiliki HDI terendah, yaitu 67,63. karena capaian pembangunan manusia relatif masih tertinggal dibandingkan kabupaten lain pada awal periode pengamatan.

Teori pembangunan ekonomi menyatakan bahwa semakin tinggi IPM yang mencerminkan perbaikan kesehatan, pendidikan, dan daya beli maka semakin besar potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, hubungan antara IPM dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Provinsi Aceh masih relevan untuk diteliti secara empiris guna melihat bagaimana kontribusi peningkatan kualitas SDM terhadap pembangunan ekonomi daerah pada lima kabupaten tersebut.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan di berbagai daerah seperti penelitian Liyala et al., (2022) Studi menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara substansial mengurangi kemiskinan dan

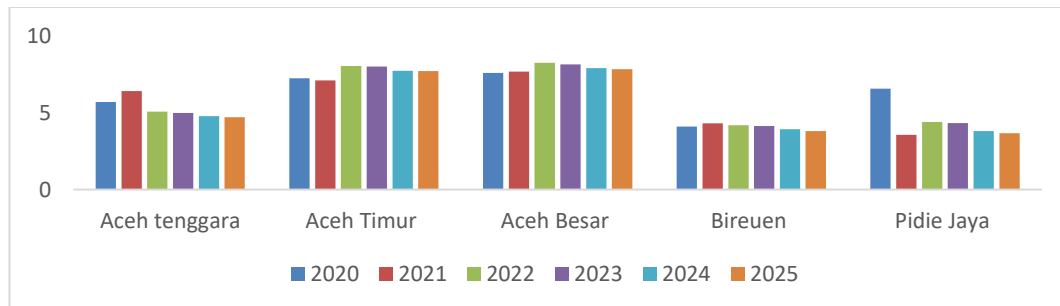
mendorong pembangunan ekonomi daerah. Monalisa dkk. (2025) Ditemukan bahwa jumlah penduduk miskin berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Sementara penelitian Hasil Yuliana (2020) menemukan bahwa IPM secara signifikan memengaruhi PDRB pada Provinsi di Indonesia. Selain itu, Muna (2025) juga menemukan pengaruh positif IPM terhadap PDRB di Kalimantan Timur.

Pengangguran dianggap memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, bersamaan dengan jumlah orang miskin dan indeks pembangunan manusia. Pengangguran dapat menyebabkan sejumlah masalah sosial dan ekonomi. Pada prinsipnya, ekonomi yang kuat dapat mempekerjakan lebih banyak orang dan menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Namun, fenomena “*jobless growth*” menunjukkan bahwa peningkatan *output* ekonomi tidak selalu diiringi peningkatan kesempatan kerja, terutama bila pertumbuhan lebih banyak berasal dari sektor padat modal (Basri & Patunru, 2021).

Fenomena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh yang naik dari 6,17 persen pada 2019 menjadi 6,59 persen pada 2020 yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Hal ini sejalan dengan kontraksi ekonomi yang terjadi pada tahun tersebut. Tren data pengangguran beberapa tahun terakhir terus menurun dari 6,59 persen (2020) menjadi 5,75 persen (2024), sementara pertumbuhan ekonomi meningkat dari -0,37 persen (2020) ke 4,66 persen (2024). Hal ini

menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi secara bertahap mampu menyerap kembali tenaga kerja dan menekan pengangguran.

Adapun grafik perkembangan tingkat pengangguran terbuka pada 5 kabupaten yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. 5 Tingkat Pengangguran Terbuka pada 5 Kabupaten Tahun 2019-2025 (Persen)

Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2020-2025 pada lima kabupaten, terlihat fenomena yang berfluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2025. TPT tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2022 sebesar 8,28%, yang menunjukkan tekanan pengangguran relatif tinggi akibat keterbatasan penyerapan tenaga kerja meskipun aktivitas ekonomi mulai pulih pascapandemi. TPT terendah terdapat di Kabupaten Bireuen pada tahun 2024 sebesar 3,93%, mencerminkan kondisi pasar kerja yang relatif lebih baik dan stabil dibandingkan kabupaten lainnya.

Iqbal dkk. (2020) menemukan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi secara signifikan menghambat upaya Indonesia untuk meningkatkan perekonomiannya. Pada saat yang sama, penelitian oleh Liyala dkk. (2022) menunjukkan bahwa di Indonesia, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi memperburuk kemiskinan dan memperlambat kemajuan ekonomi. Selain itu, PDB Provinsi Sumatera Utara secara negatif dan signifikan dipengaruhi oleh

pengangguran, menurut Siregar dkk. (2024). Lubis dan Murtala (2021) menemukan bahwa pembangunan ekonomi Provinsi Aceh secara signifikan dan negatif dipengaruhi oleh tingkat pengangguran.

Investigasi ini berfokus pada lima wilayah di Provinsi Aceh yang mengalami peningkatan aktivitas ekonomi setelah mensurvei literatur terkait. Statistik sosial ekonomi seperti tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IMB) terlihat tidak stabil dan tidak sepenuhnya mencerminkan perubahan kesejahteraan masyarakat karena hal ini. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat disimpulkan beberapa isu berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?

4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui pengaruh pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
4. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan dari karya ini adalah untuk memberikan kontribusi pada bidang teori makroekonomi dengan menjelaskan hubungan antara kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan juga akan memperkaya literatur ilmiah dan memperdalam teori bagi peneliti dan pembaca, tetapi juga bermanfaat sebagai saran.
3. Menjadi dasar untuk penguatan teori terkait keterkaitan antara indikator kemiskinan, pengangguran, IPM dengan variabel makroekonomi, sehingga memperluas perspektif dalam studi pembangunan ekonomi daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Keuntungan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Studi ini menawarkan kontribusi praktis dengan menjelaskan aspek-aspek kritis yang mempengaruhi pembangunan ekonomi Aceh Wilayah Timur, yaitu melalui analisis tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .
2. Temuan studi ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan strategi ekonomi daerah yang lebih efektif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Studi ini juga membantu lembaga perencanaan pembangunan, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan instansi lainnya, untuk

merumuskan inisiatif prioritas yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Aceh.